

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME BULAN FEBRUARI 2022



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME



**Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810**

☎ (021)1500083

📠 (021)29339690

🌐 www.bnpt.go.id

🐦 @bnptri

🐦 @sinergisitas_

📍 bnpt republik indonesia

📍 sinergisitascenter

📍 @sinergisitascenter

📍 @bnptri

📺 humas bnpt

📺 bnpt tv



Berintegritas
Nasionalisme
Profesional
Terpuji







Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan Februari 2022 telah disusun sebagai bentuk penyampaian pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden serta para pemangku kepentingan atas mandat yang diamanatkan oleh pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Laporan ini memuat kegiatan-kegiatan progresif dalam pelaksanaan program penanggulangan terorisme, sesuai dengan tugas dan fungsi BNPT untuk melaksanakan program - program pembangunan dalam rangka penanggulangan terorisme melalui tiga strategi yaitu: Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Pada tahun 2022 ini, BNPT berkomitmen serta berinovasi menanggulangi terorisme melalui konsep *Pentahelix*. Arah kebijakan strategis tahun 2022 ini diambil sebagai langkah solutif dan efektif guna memperkuat kerja sama serta kolaborasi komprehensif melalui pelibatan *multipihak* baik dari unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media maupun pelaku seni.

Sepanjang bulan Februari 2022, kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPT berfokus pada upaya pembangunan kesiapsiagaan nasional yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, baik dari institusi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun masyarakat luas. Upaya ini diterjemahkan oleh BNPT melalui berbagai kegiatan progresif yang memprioritaskan implementasi kebijakan *multipihak* atau *pentahelix*. Salah satu agenda kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan ini yang melibatkan institusi riset melalui penandatanganan kerja sama dalam program pencegahan terorisme berbasis riset antara BNPT dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada 3 Februari 2022 di Jakarta. BNPT juga terus bersinergi secara bilateral yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan kerja sama dengan berbagai negara seperti Spanyol, Iran, dan Amerika Serikat dalam rangka penganggulangan terorisme. Pelibatan organisasi keagamaan dan kolaborasi dengan institusi Negara juga dilaksanakan pada bulan ini dalam kegiatan peresmian rumah susun Pondok Pesantren Anak Mitra Deradikalisasi Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bukti konkret implementasi sinergisitas antara BNPT bersama dengan Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan Yayasan Lingkar Perdamaian. Sejalan dengan progress kolaborasi dan sinergisitas tersebut, BNPT telah menggelar rapat finalisasi Rencana Aksi (Renaksi) Kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian/Lembaga Tahun 2022 pada 22 Februari 2022 dan menghasilkan lebih dari 500 Renaksi yang siap dijalankan pada tahun 2022 sebagai salah satu upaya implementasi kebijakan *pentahelix* yang diusung BNPT tahun ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai gambaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada bulan Februari 2022 dan acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan terorisme pada bulan Maret 2022 mendatang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,

Boy Rafli Amar





DAFTAR ISI

hal

KEGIATAN KEPALA BNPT

● KEPALA BNPT KOORDINASI DENGAN PAKHAM PAPUA TERKAIT KONSEP <i>PENTAHHELIX</i> PENANGGULANGAN TERORISME	1
● KEPALA BNPT TEKANKAN SEMANGAT <i>PENTAHHELIX</i> SAAT RAPAT PIMPINAN	2
● BNPT DAN DMI SEPAKAT KOLABORASI CEGAH RADIKALISME DI RUMAH IBADAH	4
● KEPALA BNPT PIMPIN DIALOG KEBANGSAAN DI PONDOK PESANTREN <i>NURUL FALAH</i>	6
● BNPT DAN RRI SELENGGARAKAN DIALOG INTERAKTIF BERTEMA “PERAN MEDIA DALAM MEMBERANTAS TERORISME”	8
● PERINGATI HARI PERS NASIONAL, KEPALA BNPT AJAK INSAN PERS UNTUK BERIKAN INFORMASI YANG BERIMBANG	10
● PEMKOT MADIUN DUKUNG BNPT DIRIKAN WARUNG NKRI DI MADIUN	12
● KEPALA BNPT RESMIKAN RUSUN YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN DI LAMONGAN	13
● KEPALA BNPT LAKUKAN SILATURAHMI KEBANGSAAN DI PONPES <i>AL-IKHLAS</i> PASURUAN	15
● KEPALA BNPT RESMIKAN GEDUNG YAYASAN RUMAH MODERASI MOJOKERTO	16
● BNPT BERSAMA ULAMA DI PURWOSARI DAN PASURUAN AKAN GELORAKAN CINTA TANAH AIR	18
● BERTEMU PANGLIMA TNI, KEPALA BNPT BAHAS KEGIATAN INTELIJEN SINERGISITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA	20
● PONDOK KEAGAMAAN IMANI KABUPATEN BOGOR BERSINERGI DENGAN BNPT GELAR DIALOG KEBANGSAAN	22

KEGIATAN KEDEPUTIAN I BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI

● PENYERAHAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU DI JAWA TENGAH	24
● RAPAT KERJA NASIONAL FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KE-IX TAHUN 2022	25
● SILATURAHMI KEBANGSAAN DENGAN KYAI DAN ULAMA DI PONDOK PESANTREN <i>AL-IKHLAS</i> , PASURUAN, JAWA TIMUR	27
● PENYERAHAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TERORISME BOM BALI I DAN II	29
● PENYERAHAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TERORISME DI JAKARTA	31

KEGIATAN KEDEPUTIAN II BIDANG PENINDAKAN, DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN

● <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PERISTIWA SERANGAN BOM DI KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA TAHUN 2004 GUNA MENJAWAB PERMINTAAN INFORMASI DARI PEMERINTAH ITALIA	32
● PERTEMUAN RUTIN ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME	33
● RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGAMANAN PENUNTUT UMUM TERKAIT PELIMPAHAN PERKARA TAHAP II TINDAK PIDANA TERORISME BULAN JANUARI 2022	34
● RAPAT KOORDINASI INTELIJEN ANALISIS POTENSI ANCAMAN PEMALSUAN PASPOR SEBAGAI MODUS KEPULANGAN FTF INDONESIA DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN DETEKSI DINI TINDAK PIDANA TERORISME	35
● RAPAT PENYUSUNAN SILABUS PELATIHAN MITIGASI AKSI TERORISME <i>INTEGRATIVE</i>	37
● PENGUKURAN INDEKS KESIAPAN APARATUR TAHAP I DI KOTA CILEGON	39

DAFTAR ISI

	hal
KEGIATAN KEDEPUTIAN III BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL	
● KUATKAN PAYUNG HUKUM PENANGGULANGAN TERORISME, BNPT SIAPKAN <i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING</i> (MOU) DENGAN KERAJAAN SPANYOL	41
● BNPT DAN IRAN RAJUT KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI <i>MOU</i>	42
● RAPAT PEMBAHASAN KERJA SAMA PELATIHAN TERKAIT ANCAMAN TERORISME KIMIA, BIOLOGI, RADIOLOGI, DAN NUKLIR (KBRN) OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT.....	44
● BNPT MENGHADIRI RAPAT SATUAN TUGAS DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT) YANG DILAKSANAKAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK).....	46
KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA	
● BNPT DAN BRIN TEKEN <i>MOU</i> PROGRAM PENCEGAHAN TERORISME BERBASIS RISET	48
● GELAR <i>SHARING SESSION</i> , BNPT AJAK MEDIA UNTUK MENYUARAKAN NARASI	
● PERDAMAIAN GUNA MEREDAM NARASI UJARAN KEBENCIAN DAN HOAKS.....	50
KEGIATAN SINERGISITAS ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGA	
● BNPT DAN PEMKOT MADIUN AKAN DIRIKAN WARUNG NKRI UNTUK PENCEGAHAN TERORISME	52
● PERESMIAN RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN ANAK MITRA DERADIKALISASI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN	53
● GELAR RAPAT FINALISASI RENCANA AKSI KEGIATAN SINERGISITAS ANTAR K/L TAHUN 2022, BNPT HARAP KOLABORASI PENANGGULANGAN TERORISME TIM SINERGISITAS SEMAKIN MENINGKAT	54
● PAHAM POTENSI DAN PELUANG USAHA WILAYAH DEMI KESEJAHTERAAN MITRA DERAD, KEPALA BNPT HADIRI RAPAT SINERGISITAS KTN (KAWASAN TERPADU NUSANTARA)	56
PERKEMBANGAN KEGIATAN SINERGISITAS ANTARKEMENTERIAN/LEMBAGA BULAN FEBRUARI 2022	
● BNPT TETAPKAN LIMA LOKUS DAERAH SEBAGAI KAWASAN PRIORITAS KTN 2022	57
● KONDISI KOPERASI DI 5 (LIMA) KAWASAN PRIORITAS KTN 2022.....	58
● TIM KTN KAWAL SELURUH PERSIAPAN <i>SOFT LAUNCHING</i> KTN TUREN, MALANG	59
● REVISI DASAR HUKUM	60
● FINALISASI RENCANA AKSI	61
TINDAK LANJUT RAN PE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022	
● MAKSIMALKAN IMPLEMENTASI PROGRAM RAN PE, BNPT GELAR RAPAT TIM INTERNAL PERDANA DI 2022	62

DAFTAR SINGKATAN

BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
FPK	: Forum Pembauran Kebangsaan
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
YLP	: Yayasan Lingkar Perdamaian
KTN	: Kawasan Terpadu Nusantara
Warung NKRI	: Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
FTF	: <i>Foreign Terrorist Fighter</i>
Bapeten	: Badan Pengawas Tenaga Nuklir
OBP	: <i>The One Banner Project Incorporated</i>
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
WHC	: <i>World Human Care</i>
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
DTTOT	: Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
OBP	: <i>The One Banner Project</i>
RAN PE	: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme
Sekber	: Sekretariat Bersama
Pokja	: Kelompok Kerja
Pakham	: Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia
Rapim	: Rapat Pimpinan
Raker	: Rapat Kerja
IHNU	: Ikatan <i>Habaib</i> Nahdlatul Ulama
DMI	: Dewan Masjid Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wantimpres	: Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
HPN	: Hari Pers Nasional
YLP	: Yayasan Lingkar Perdamaian
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IMANI	: Inovasi <i>Muballigh</i> Nurul Ibadah Indonesia



KEGIATAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KEPALA BNPT KOORDINASI DENGAN PAKHAM PAPUA TERKAIT KONSEP PENTAHHELIX PENANGGULANGAN TERORISME



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka ruang komunikasi dan koordinasi yang seluas-luasnya dalam rangka menjalankan konsep *pentahelix* Penanggulangan Terorisme. Ruang komunikasi tersebut salah satunya dijalin dengan pertemuan antara Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., bersama pimpinan organisasi Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia (Pakham) Papua. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPT menekankan bahwa berbagai upaya kekerasan yang mengarah kepada terorisme harus dapat diselesaikan dengan program afirmasi yang disusun secara komprehensif oleh kementerian, lembaga, unsur – unsur akademisi, tokoh – tokoh HAM, tokoh adat, maupun tokoh agama.

Sementara itu, Pendiri dan Ketua Pakham Papua, Prof. Yezlam Aluini mengatakan bahwa pihaknya selama ini memberikan apresiasi kepada BNPT dalam usaha antisipatif masalah terorisme. Prof. Yezlam menambahkan, masalah kekerasan yang mengarah kepada tindakan terorisme tidak boleh dilawan dengan kekerasan tapi dengan dialog. Hal yang sama disebutkan oleh Direktur Pakham, Mathius Murib. Menurutnya, kekerasan tak bisa dihadapi dengan kekerasan. Termasuk menghadapi kelompok terorisme di Papua.

Dalam pertemuan ini dibahas pula kemungkinan kerja sama kedua belah pihak dalam rencana pendirian Forum Tujuan Nasional yang merupakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

KEPALA BNPT TEKANKAN SEMANGAT PENTAHHELIX SAAT RAPAT PIMPINAN



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menekankan pentingnya semangat *Pentahelix* dalam melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BNPT. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) BNPT bulan Februari dan Penandatanganan Perjanjian Kerja di Gedung BUMN, Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Lebih lanjut, menurutnya semangat *Pentahelix* dalam upaya penanggulangan terorisme harus proaktif. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab kesimpulan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di bulan Januari lalu.

Keterbukaan koordinasi dan kerjasama multipihak juga dijabari BNPT melalui program *Santripreneur* yang digiatkan oleh pengurus Pesantren *Darul Ulum wal Hikam* Yogyakarta, KH. Ahmad Sugeng

Utomo atau yang akrab dikenal Gus Ut. Menurut Kepala BNPT, program *Santripreneur* dapat disandingkan dengan program deradikalisasi berbasis kesejahteraan. Target program adalah eks napiter dan penyintas. Diharapkan *output* program ini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Senada dengan Kepala BNPT, Gus Ut mengungkapkan banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya bergabung



dengan jaringan terorisme karena terhimpit masalah ekonomi. Maka dari itu, BNPT melaksanakan program deradikalisasi berbasis kesejahteraan. Salah satunya dengan mendidik dan memberikan bantuan agar masyarakat yang rawan terpapar dan eks napiter pulih secara ekonomi dan tidak mudah terpengaruh paham radikal. Hingga saat ini, BNPT telah melakukan upaya pendekatan deradikalisasi dengan pendekatan kesejahteraan. Hal ini diwujudkan dengan rencana pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang akan didirikan di lima provinsi. Di dalam

KTN, eks napiter, korban aksi terorisme dan masyarakat sekitar bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk mendapatkan efek positif ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Selain Gus Ut, hadir pula dalam Rapim Dr. KH. Abdul Wahid Maktub dan Ulama Jakarta sekaligus Ketua Ikatan *Habaib* Nahdlatul Ulama (IHNU) Habib Salim bin Shalahuddin bin Salim bin Jindan. Para ulama ini turut hadir memberikan saran dan pesan kepada BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme.



BNPT DAN DMI SEPAKAT KOLABORASI CEGAH RADIKALISME DI RUMAH IBADAH



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. beraudiensi dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan jajaran pengurus DMI pada Jumat, 4 Februari 2022. Dalam kegiatan ini, Kepala BNPT menjelaskan bahwa bahaya paham radikal terorisme dapat masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat, termasuk rumah ibadah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beragam fenomena dalam rumah ibadah, di mana terdapat pihak-pihak yang menyalah gunakan narasi agama dan menggunakan ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya. Selain itu, hal lain yang juga perlu diwaspadai adalah radikalisasi ruang digital. Kepala BNPT menjelaskan bahwa radikalisasi semacam ini dapat menciptakan aktor tunggal (*lone-wolf*) dalam aksi

terorisme, bahkan anak muda pun menjadi sasaran yang rentan terjebak dalam *self-radicalization* ini.

Sebagai langkah pencegahan, BNPT menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DMI dalam memberikan penguatan terkait bahaya radikal terorisme dan wawasan kebangsaan. Pembinaan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DMI



sepakat bahwa terorisme tidak hanya menjadi tugas BNPT semata, melainkan tugas seluruh komponen bangsa. Sebagai lembaga yang mendorong fungsi masjid sebagai tempat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat, DMI

menjadi mitra strategis BNPT dalam menyuarakan pesan anti kekerasan dan anti terorisme melalui masjid. Dalam hal ini, Ketua DMI mendukung penuh upaya pencegahan terorisme bersama BNPT.



KEPALA BNPT PIMPIN DIALOG KEBANGSAAN DI PONDOK PESANTREN NURUL FALAH



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Pondok Pesantren Nurul Falah melaksanakan kegiatan Silaturahmi dan dialog kebangsaan BNPT RI dengan FORKOPIMDA, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Provinsi Banten di Pondok Pesantren Nurul Falah, Kecamatan Lebak, Provinsi Banten pada Senin, 7 Februari 2022. Dialog Kebangsaan merupakan agenda rutin BNPT yang bertujuan untuk mengajak seluruh pihak khususnya tokoh agama dan masyarakat dalam mencegah paham radikal terorisme.

Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menyatakan bahwa pencegahan paham radikal terorisme harus terus digiatkan dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap rukun, bersatu dan harmoni. Kepala BNPT mengibaratkan paham radikal terorisme sebagai virus yang berbahaya layaknya *Covid-19*. Orang yang

terpapar paham radikal intoleran bisa saja tidak memiliki tanda – tanda dan sikap tertentu. Dalam mencegah virus radikal terorisme, nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam empat konsensus kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harus terus digelorkan terutama dalam ruang dialog kebangsaan.

Sementara itu Dr. (H.C.). Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya mendukung kegiatan BNPT dalam merawat



persatuan dan kesatuan dalam dialog kebangsaan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) yang juga menjabat Ketua Kelompok Ahli BNPT ini menjelaskan upaya BNPT dalam merawat persatuan dan kerukunan bangsa harus didukung dan dipelihara sebagaimana leluhur bangsa Indonesia telah mewariskan semangat persatuan dan kesatuan. Di waktu yang sama, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP., mendukung penuh kegiatan Dialog Kebangsaan di wilayah Banten. Beliau melihat paham

radikal terorisme banyak muncul di dunia digital. Untuk itu dirinya membuka lebar kerjasama dengan BNPT dalam rangka peningkatan literasi digital untuk masyarakat Banten agar tidak mudah terpapar paham radikal.

Pemimpin Pondok Pesantren Nurul Falah, K.H. Ahmad Rafiudin sebagai tuan rumah kegiatan Dialog Kebangsaan mengatakan segenap keluarga besar Pesantren Nurul Falah mendukung peran BNPT.



BNPT DAN RRI SELENGGARAKAN DIALOG INTERAKTIF BERTEMA PERAN MEDIA DALAM MEMBERANTAS TERORISME



Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) mengadakan dialog interaktif mengusung tema "Peran Media Dalam Memberantas Radikalisme dan Terorisme" di RRI Kendari pada Selasa, 8 Februari 2022. Turut hadir sebagai narasumber Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H secara daring, Direktur Utama RRI, Hendrasmo, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya.

Kepala BNPT menjelaskan dengan semangat *Pentahelix*, BNPT terus bersinergi dengan media massa dan entitas media sosial dalam menginformasikan pemberitaan tentang pencegahan dan penanggulangan paham radikal terorisme.

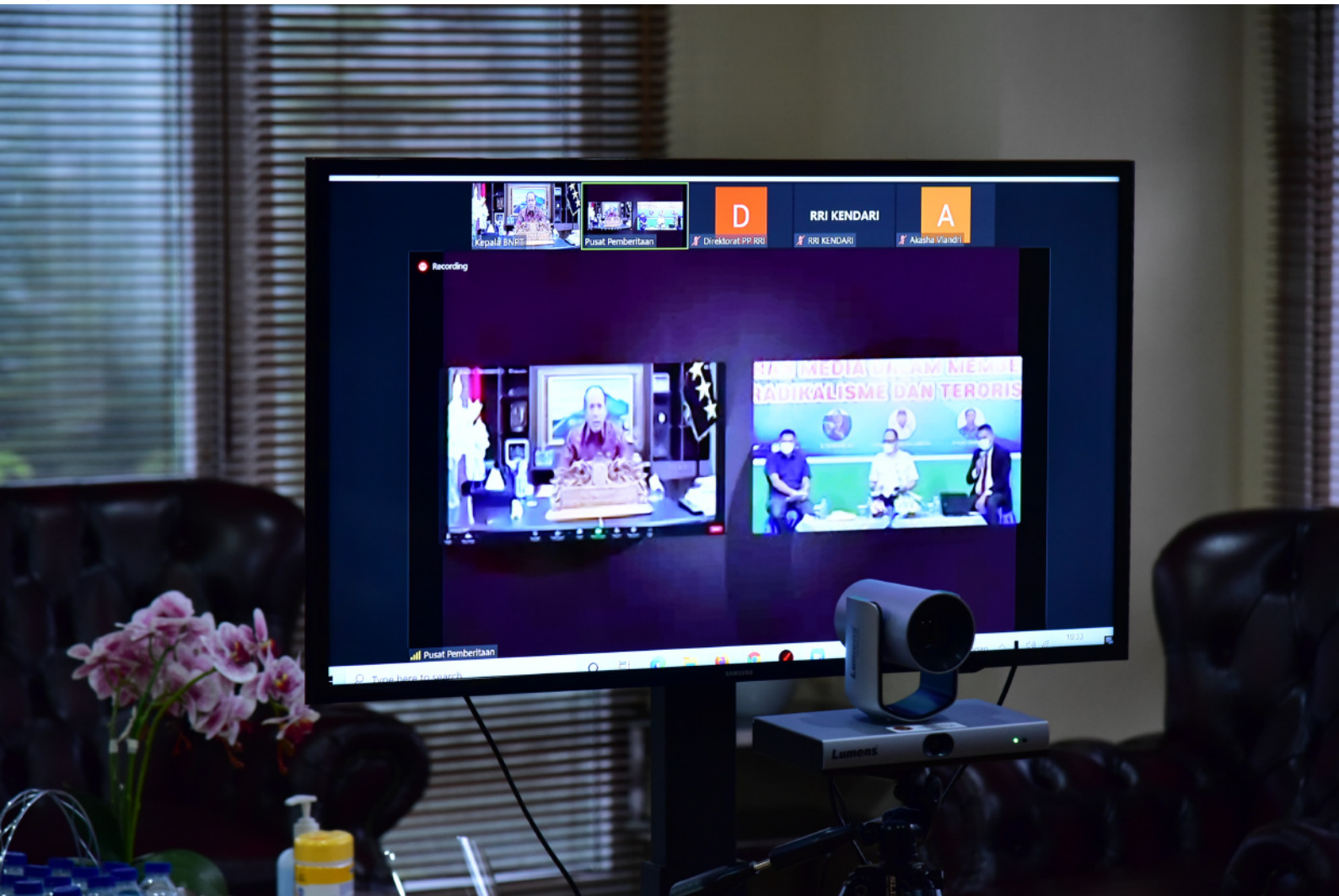
BNPT juga turut mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mereduksi pengaruh narasi-narasi yang diciptakan kelompok radikal. Sejatinya, kelompok jaringan teroris menginginkan narasi pemberitaan dari media massa maupun media sosial yang dapat menyebarkan propaganda mereka hingga menimbulkan rasa takut yang meluas di tengah masyarakat. Melihat ancaman bahaya tersebut, BNPT terus berupaya menyampaikan pesan-pesan damai melalui media massa dan media sosial agar masyarakat tidak mudah terpedaya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala BNPT, Direktur Utama RRI, Hendrasmo mengatakan bahwa penyajian informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya radikal-terorisme harus sesuai fakta dan membutuhkan sinergi

bersama seluruh elemen. Hendrasmo menambahkan, kehadiran RRI dapat membantu memberikan informasi dan edukasi dengan kontra narasi.

Sementara itu, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Periode 2019 – 2022, M. Agung Dharmajaya menyebutkan persoalan terorisme adalah persoalan seluruh elemen bangsa, di mana

media harus mengambil peran dalam memberantasnya. Media tidak boleh memberikan ruang kepada kelompok radikal terorisme dalam melancarkan aksi propaganda. Para jurnalis harus memahami terlebih dahulu fungsi dari media dalam memberikan informasi dan tidak berada dalam posisi yang menyajikan narasi provokasi.



PERINGATI HARI PERS NASIONAL, KEPALA BNPT AJAK INSAN PERS UNTUK BERIKAN INFORMASI YANG BERIMBANG



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 secara daring yang digelar di plataran Masjid Al-Alam, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu, 9 Februari 2022. Pentingnya media massa dalam menyorot perkembangan dan aktifitas kelembagaan menjadi corong informasi bagi masyarakat. Presiden Jokowi menegaskan, di tengah pandemi *Covid-19*, insan pers mengalami kondisi penuh tekanan. Media *mainstream* menjadi arus utama yang cepat bertransformasi, semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal dan *platform* dengan berita-berita yang baik, mencerdaskan dan mengisi konten – konten berkualitas.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-kementerian, BNPT bertugas menanggulangi terorisme dengan upaya pencegahan di lapangan dengan terus berinovasi menciptakan konsep baru, salah satunya dengan konsep *Pentahelix* yang melibatkan peran media. Pada kesempatan ini Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menyatakan pentingnya peran media sebagai



penyambung informasi program BNPT dalam mengikis mata rantai penyebaran radikalisme dan terorisme. Boy mengatakan, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung, demi keutuhan NKRI. Kedaulatan informasi memang harus diwujudkan untuk rakyat Indonesia. Masyarakat harus memperkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat serta membangun dan memperkuat *platform* nasional periklanan. Menciptakan *platform* *video* nasional, agar tidak sepenuhnya tergantung pada *platform* *video* dari internasional.

Ketua PWI Pusat yang juga selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Atal S. Depari juga menyinggung, Indonesia

adalah potensi besar yang menggiurkan dalam perkembangan dunia digital. Potensi ini harus dikembangkan oleh generasi Indonesia agar tidak menjadi objek eksploitasi para raksasa digital global. Maka dalam membangun kedaulatan digital, membangun kemandirian, ia mengingatkan masyarakat agar menempatkan diri secara baik dalam peta digitalisasi global guna kepentingan nasional. Tepat di peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022, BNPT melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dewan Pers, yang dilakukan secara *virtual* bersama Mabes TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.



PEMKOT MADIUN DUKUNG BNPT DIRIKAN WARUNG NKRI DI MADIUN



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. bersilaturahmi dengan Forkopimda Kota Madiun di Taman Sumber Wangi pada Minggu, 13 Februari 2022. Silaturahmi ini merupakan bagian dari perwujudan kolaborasi multipihak (*Pentahelix*) penanggulangan terorisme khususnya dalam aspek pencegahan di Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi *pentahelix* ini terus digalakkan BNPT dengan melibatkan pemerintah daerah. Diharapkan, kedepannya masyarakat dapat terproteksi dari ancaman propaganda terorisme.

Kepala BNPT juga mengapresiasi keinginan Walikota Madiun, H. Maidi untuk bermitra dengan BNPT mendirikan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI) di Madiun. Sementara itu, Walikota Madiun mengatakan bahwa Warung NKRI ini akan sangat bermanfaat

dalam rangka pembauran kebangsaan. Kota Madiun merupakan cerminan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat terlihat dari harmoni keberagaman masyarakatnya. Hal ini patut dicontoh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Madiun.

Selain di Kota Madiun, Kepala BNPT rencananya akan melakukan kegiatan silaturahmi untuk membuka komunikasi kerjasama multipihak di Lamongan, Malang, dan Sumenep.



KEPALA BNPT RESMIKAN RUSUN YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN DI LAMONGAN



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meresmikan Rumah Susun Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada Senin, 14 Februari 2022. Pembangunan rumah susun ini merupakan kerja sama dan kolaborasi antara Tim Sinergisitas BNPT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemda Lamongan, Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP), dan seluruh pihak terkait. Rumah susun ini akan digunakan untuk menampung anak – anak mitra deradikalisasi di Pondok Pesantren Lingkaran Perdamaian yang tengah mendalami ajaran agama.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. berharap rusun ini dapat dimanfaatkan dengan baik terutama dalam mendidik anak bangsa yang beriman dan bertaqwa serta memiliki rasa cinta tanah

air yang tinggi. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, S.T., M.T. yang memberikan sambutan secara daring juga berharap penguatan karakter kebangsaan dan moderasi beragama dapat ditanamkan sejak dini kepada anak-anak penghuni rusun. Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.A. menambahkan berdirinya rusun memberikan



arti yang besar kepada warga Kabupaten Lamongan. Menurutnya hal ini merupakan komitmen Kabupaten Lamongan bersama beriringan dengan BNPT dalam ikhtiar melakukan pencegahan masuknya paham radikal terorisme.

Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi menekankan bahwa selama ini negara yang direpresentasikan oleh BNPT telah hadir dan peduli terhadap mitra deradikalisasi. Salah satunya lewat

pembangunan rumah susun ini. Menurut adik Ali Imron ini, rumah susun ini akan digunakan untuk mendidik anak – anak eks napiter dan mantan kombatan secara gratis dalam upaya membendung paham radikal terorisme yang masih terus berkembang. Rumah susun yang berlokasi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro ini memiliki luas bangunan 537,31 meter persegi dengan kapasitas hunian 84 orang.



KEPALA BNPT LAKUKAN SILATURAHMI KEBANGSAAN DI PONPES AL-IKHLAS PASURUAN



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. melakukan Silaturahmi Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhlas, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan pada Rabu, 16 Februari 2022. Dalam kunjungan tersebut Kepala BNPT berdialog dengan para pimpinan Ponpes Al-Ikhlas beserta sejumlah kyai dan ulama di wilayah Pasuruan. Dialog tersebut membahas kerja sama dan kolaborasi dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

Selama ini, menurut Kepala BNPT sejumlah kyai dan ulama terdahulu senantiasa menggelorakan semangat cinta tanah air dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Kepala BNPT menuturkan selama ini jaringan radikal dan teroris telah menyalahgunakan narasi – narasi agama

agar banyak orang yang terbujuk dan terjerumus. BNPT menggandeng semua pihak untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan multipihak termasuk lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal termasuk dengan pemuka agama dan pesantren. Konsep kerjasama dengan berbagai pihak ini dikenal dengan sebutan konsep *pentahelix* penanggulangan terorisme.



KEPALA BNPT RESMIKAN GEDUNG YAYASAN RUMAH MODERASI MOJOKERTO



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. meresmikan Gedung Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto di Desa Betro, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Kamis, 17 Februari 2022. Rumah moderasi tersebut hadir berkat inisiasi mitra deradikalisasi asal Mojokerto, Sutrisno dan tokoh masyarakat, Ali Imron yang didukung oleh BNPT, Pemda Mojokerto dan sejumlah pihak terkait. Kepala BNPT mengapresiasi Sutrisno, yang dahulu pernah menjadi pelaku terorisme, kini berkeinginan melawan narasi radikal terorisme lewat Rumah Moderasi.

Bupati Mojokerto, Dr. Ikfina Fahmawati, M.Si. turut bangga dengan kehadiran Rumah Moderasi yang diinisiasi warganya. Menurut Beliau, pengalaman sebagai mantan teroris yang pernah dialami pendiri Rumah Moderasi akan membuat upaya kontra narasi radikalisme semakin kuat dan punya dampak yang luas. Tak hanya soal kontra narasi, diharapkan kewaspadaan nasional dan upaya pencegahan radikal terorisme yang dibungkus dengan konten kreatif juga

dapat dihasilkan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto, Ali Imron berharap Rumah Moderasi ini bisa memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia khususnya warga Mojokerto. Pembina Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto, Sutrisno bercerita bahwa keinginan untuk membuat Rumah Moderasi telah lama ia impikan. Saat di penjara, ia merasa sangat menyesal karena pernah terpapar paham radikal terorisme, hingga melupakan keluarganya dan masyarakat sekitar. Ketika bebas Sutrisno langsung berikhtiar untuk menjadi



bagian dalam upaya mencegah masuknya paham radikal terorisme.

Di dalam Rumah Moderasi terdapat

Warung NKRI, wadah usaha mitra deradikalisasi dan juga studio *podcast* untuk membuat konten-konten kontra propaganda radikal terorisme.



BNPT BERSAMA ULAMA DI PURWOSARI DAN PASURUAN AKAN GELORAKAN CINTA TANAH AIR



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tahun 2022 ini terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan konsep *Pentahelix* yaitu kerja sama dan kolaborasi multipihak. Salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dilakukan melalui silaturahmi kebangsaan di Pesantren Sidogiri Pasuruan pimpinan KH. Ahmad Fuad Noerhasan dan di Pesantren Ngalah Purwosari pimpinan KH. Sholeh Bahruddin, di Kabupaten Pasuruan pada Rabu, 16 Februari 2022.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, M.H. melihat peran strategis para pemuka agama khususnya di Lembaga Pendidikan keagamaan untuk dapat bersama-sama BNPT dalam memberikan semangat kebangsaan dan rasa cinta

tanah air kepada para santri. Lebih lanjut, Kepala BNPT menyampaikan jika sejumlah kyai dan ulama telah membantu menggelorakan semangat cinta tanah air dan memperkuat nilai – nilai kebangsaan yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu serta bagaimana menjaga bangsa ini dengan membangun semangat kebangsaan.

Kepala BNPT kembali menekankan



jika selama ini jaringan radikal dan terorisme telah menyalahgunakan narasi – narasi agama agar banyak orang yang bersimpati dan terjerumus. BNPT akan mengajak banyak pihak untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan konsep multi pihak

termasuk lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal serta para pemuka agama dan pesantren. Konsep kerjasama dengan berbagai pihak ini dikenal dengan sebutan konsep *pentahelix* penanggulangan terorisme.



BERTEMU PANGlima TNI, KEPALA BNPT BAHAS KEGIATAN INTELIJEN SINERGISITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus bersinergi dengan beragam pihak untuk melakukan pencegahan dalam rangka mengurangi tingkat penyebaran paham radikal intoleran. Salah satu kegiatan pencegahan adalah kegiatan atau operasi intelijen pencegahan. Hal tersebut yang mendasari pertemuan Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Rabu, 23 Februari 2022 di Gedung Soedirman Mabes TNI Cilangkap.

Selama ini, BNPT telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Intelijen Pencegahan, dan sejak tahun 2018 telah dibentuk Tim Sinergisitas Antar Kementerian /Lembaga untuk turut mengambil peran dalam menurunkan tingkat penyebaran paham radikal intoleran. Operasi Intelijen

Pencegahan BNPT dilaksanakan oleh Satgas Pencegahan yang dibentuk sejak tahun 2012. Sebagai Pelaksana kegiatan adalah personel dari BNPT dan personel BKO dari TNI dengan tugas dan fungsi masing – masing.

Kerja sama ini disambut baik oleh Panglima TNI mengingat masalah terorisme adalah masalah bersama dan membutuhkan



perlawanan secara masif dan integral. Arah dan ukuran keberhasilan penanggulangan terorisme sangat ditentukan dengan seberapa besar irisan sinergi yang dapat dibangun dengan beragam pihak terkait. Penguatan sinergi antara BNPT dan TNI

merupakan pendekatan *pentahelix* untuk keberlanjutan dan konsistensi program pencegahan terorisme, dimana pihak –pihak yang saling terkait bersama – sama memutus rantai propaganda radikal intoleran.



PONDOK KEAGAMAAN IMANI KABUPATEN BOGOR BERSINERGI DENGAN BNPT GELAR DIALOG KEBANGSAAN



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar dialog kebangsaan dengan Ulama Kabupaten Bogor dan Inovasi *Muballigh* Nurul Ibadah Indonesia (IMANI) Indonesia pada Kamis, 24 Februari 2022 bertempat di *Lobby* Baladika kantor BNPT Sentul. Dialog dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., Sestama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP. didampingi jajaran pejabat dari Kedeputan 1, 2, dan 3. Karakteristik gerakan Islam moderat yang bertumpu pada nilai – nilai agama dan kebudayaan, di mana nilai – nilai tersebut dikembangkan untuk mendukung pembangunan negara sudah terbentuk sejak dulu. Akan tetapi, saat ini masih ditemukan oknum – oknum pemecah persatuan yang berusaha merusak identitas tersebut. Oleh karena itu, perwakilan

IMANI menyampaikan kesediaannya menjadikan salah satu pondok pendidikan agama Islam miliknya bersinergi dengan BNPT.

Merespon antusiasme para ulama dan anggota IMANI, Kepala BNPT berharap agar setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan negara dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dialog



tersebut juga membahas peran pemuka agama dalam mendukung generasi muda tentang Islam moderat. Melalui pemahaman yang benar dan utuh tentang

agama, toleransi antar umat, serta nilai-nilai kebangsaan, diharapkan generasi muda terhindar dari ideologi yang tidak sesuai dengan nilai – nilai luhur bangsa.





KEGIATAN KEDEPUTIAN I BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI

PENYERAHAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU DI JAWA TENGAH



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diwakili oleh Direktur Perlindungan, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, bersama ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim., dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, S.H., M.IP., menyerahkan dana ganti kerugian (kompensasi) kepada 22 (dua puluh dua) penyintas di Jawa Tengah dengan total nilai mencapai Rp 3,4 Miliar

pada hari Selasa, 8 Februari 2022.

Direktur Perlindungan BNPT mengatakan penyerahan kompensasi merupakan bagian komitmen BNPT untuk terus hadir bagi penyintas tindak pidana terorisme. BNPT memiliki salah satu peran yaitu mengidentifikasi penyintas sampai menerbitkan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan dasar pemberian kompensasi.



RAPAT KERJA NASIONAL FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KE-IX TAHUN 2022



Dengan bergabungnya Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 2022, secara resmi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebar diseluruh provinsi di Indonesia.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT diselenggarakan pada 14 hingga 16 Februari 2022 di Kota Batu, Jawa Timur, bertemakan “BNPT Hadir, Indonesia Harmoni”, Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. secara langsung meresmikan acara yang dilaksanakan secara luring dan daring, sekaligus melantik pengurus FKPT periode 2022 hingga 2025.

Dengan hadirnya pengurus FKPT dari 34 provinsi dalam acara Rakernas ini, Kepala BNPT berharap upaya pencegahan terorisme semakin efektif, masif dan menyeluruh kepada setiap elemen mas-

yarakat.

Acara dihadiri juga oleh Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP. beserta jajaran Eselon III lingkungan BNPT serta Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak beserta unsur Forkopimda Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur.

Sepanjang tahun 2021, ke lima bidang FKPT di seluruh provinsi berhasil menjalankan upaya kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi di tengah



masyarakat melalui forum komunikasi, *survey* indeks resiko terorisme dan kegiatan lainnya.

Upaya tersebut diapresiasi oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI yang mencatat rekor FKPT Jawa Timur melalui bidang agama, sosial dan

budaya sebagai peserta terbanyak yang mengikuti lomba pembuatan *video* pendek bertemakan “Guru Pelopor Moderasi Beragama”. Adapun lomba tersebut diselenggarakan oleh BNPT dengan total karya yang dikirim sebanyak 3.044 *video*.



SILATURAHMI KEBANGSAAN DENGAN KYAI DAN ULAMA DI PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS, PASURUAN, JAWA TIMUR



Dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan Pesantren, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersilaturahmi dengan para pengurus Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur pada 16 Februari 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ikhlash, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. beserta jajaran pejabat BNPT serta para pengurus Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam silaturahmi tersebut, membahas program pencegahan terorisme di lingkungan Pesantren, Kepala BNPT berharap agar para pengurus Pesantren dapat menjaga anak didiknya agar terhindar dari paparan paham radikalisme. Selain itu, juga membahas mengenai kerja sama dan kolaborasi dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

Usai melakukan silaturahmi di Ponpes Al-Ikhlash, Pasuruan, Kepala BNPT beserta rombongan melanjutkan rangkaian kegiatan, yaitu menyambangi kediaman pengasuh Ponpes Sinogiri, yaitu KH. Ahmad Fuad Nur Hasan. Pesantren Sinogiri merupakan salah satu Pesantren tertua di Jawa Timur.



Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pesantren *Al Fallah As Sadduqiyah* dan kediaman KH. Soleh Bahruddin selaku pimpinan Ponpes Ngalah, Pasuruan. Ponpes Ngalah ini dikenal dengan Pesantren yang menanamkan pendidikan multikultural

dalam membentuk akhlak santrinya. Langkah BNPT dengan melibatkan Ulama dan Pesantren merupakan salah satu kerja sama multipihak dalam upaya menanggulangi terorisme di Indonesia.



PENYERAHAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TERORISME BOM BALI I DAN II



Jumat, 18 Februari 2022, berlokasi di Wisma Saba, Bali, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diwakili oleh Direktur Perlindungan, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali berikan dana kompensasi kepada 43 orang korban tindak pidana terorisme dalam kasus Bom Bali I dan II.

Total dana kompensasi senilai Rp 6,1 Miliar diberikan dalam rangka memenuhi hak dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu dengan sasaran kompensasi berjumlah 357 orang korban dari 57 peristiwa di 19 provinsi di Indonesia, juga WNA, WNI yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Jerman, Australia, Kanada dan Belanda.

BNPT dan LPSK terus bersinergi dengan Pemerintah Bali dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk terus siapkan program pelatihan, dimulai dari penyintas yang

berada di Bali. Tujuannya agar para penyintas dapat berkembang dan terus bertahan di masa mendatang.

INR, yang merupakan seorang penyintas, mengapresiasi program upaya pembinaan dan kompensasi yang telah diberikan.

Pihak LPSK terus berupaya membantu dengan membentuk organisasi penyintas Bali, begitu pula dengan pihak UNODC terus berupaya untuk mencari sumber



daya yang berkaitan dengan program dan terus melakukan penelitian sejak tahun 2018. Mereka berharap nantinya tidak ada

lagi tindak pidana terorisme yang merugikan, terutama bagi bangsa Indonesia.



PENYERAHAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TERORISME DI JAKARTA



Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Nisan Setiadi, bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berikan kompensasi kepada 46 penyintas yang berdomisili di DKI Jakarta sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada korban terorisme masa lalu di Kantor Balai Kota DKI Jakarta pada 22 Februari 2022.

Selain sebagai bentuk tanggung jawab negara, kompensasi yang diberikan merupakan bekal yang disiapkan agar penyintas dapat bertahan di masa mendatang. Total kompensasi yang telah diserahkan sejumlah Rp 7,4 Miliar yang diterima penyintas sesuai *assessment*

yang telah dilakukan terhadap tingkatan luka masing-masing penyintas.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan angka permohonan kompensasi tertinggi ke-3 setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan 233 permohonan. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan BNPT dan LPSK dalam membina penyintas. Beliau juga mengapresiasi kinerja BNPT dan LPSK dalam menjalankan amanat terkait pemenuhan hak penyintas.

Selain berikan kompensasi, BNPT, LPSK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berikan program pendampingan sosial dan ekonomi kepada penyintas. Apresiasi juga diberikan dari F, salah satu penyintas Bom Bali II.





KEGIATAN KEDEPUTIAN II BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI

***FOCUS GROUP DISCUSSION* PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PERISTIWA SERANGAN BOM DI KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA TAHUN 2004 GUNA MENJAWAB PERMINTAAN INFORMASI DARI PEMERINTAH ITALIA**



Pada Tanggal 25 Februari 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* Penegakan Hukum Terkait Peristiwa Serangan Bom di Kedutaan Besar Australia Tahun 2004 guna menjawab permintaan Informasi dari Pemerintah Italia yang dilaksanakan di Hotel *Wyndham Casablanca*. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT dan dihadiri oleh Kepolisian RI; Direktorat Penyidikan Densus 88 AT Polri; Ditreskrimum PMJ; Kamneg POLDA; Kejaksaan Agung RI; Kasubdit Pra Penuntutan; Kasubdit Eksekusi dan Eksaminasi; Kementerian Hukum dan HAM; Ditjen PAS; Ditjen Imigrasi; LPSK RI; Dukcapil Kemendagri; Kejari Jakarta Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang kesempatan sebagai forum diskusi antar aparat penegak hukum dan beberapa K/L terkait dan mengefektifkan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 43G huruf Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai bentuk respon tanggung jawab dalam menyinergikan antar Kementerian /Lembaga Hal yang dicapai dalam kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi antar kelembagaan/badan, diperoleh pula informasi terkini perihal penegakan hukum

dalam peristiwa serangan bom di kedutaan besar Australia. Dan juga kegiatan ini memfasilitasi surat yang diterima dari kementerian Luar Negeri pada bulan Desember 2021 dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi terkait progres penegakan hukum yang sudah berjalan atas aksi teror pada tanggal 9 September 2004, yaitu bom bunuh diri di depan kedutaan Besar Australia.



PERTEMUAN RUTIN ANTAR PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME



Pada Tanggal 17 Februari 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan Kegiatan Pertemuan Rutin Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan di Hotel *De Paviljoen* Bandung. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT dan dihadiri oleh Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI; Lapas Kelas II A Banceuy; Lapas Kelas II A Subang; Lapas Kelas II B Purwakarta; Lapas Kelas II B Cianjur; Lapas Kelas II B Sumedang; Lapas Perempuan Kelas II A Bandung; Rutan Kelas I Bandung; Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI; Kemenkumham RI (PK Madya, PK Muda); Kantor wilayah Jawa Barat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terselenggaranya proses penegakan

hukum tindak pidana terorisme dan mengefektifkan implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal yang dicapai dalam kegiatan ini ialah adanya kesepakatan antar para hadirin bahwa pembinaan terhadap narapidana terorisme harus adanya perhatian serius dan kegiatan konsolidasi berbentuk sosialisasi SOP dalam perlindungan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme, akan dilakukan pertemuan lanjutan. Dan juga kegiatan ini memfasilitasi aparat penegak hukum wilayah untuk bersinergi terkait penanganan perkara tindak pidana terorisme.



RAPAT KOORDINASI FASILITASI PENGAMANAN PENUNTUT UMUM TERKAIT PELIMPAHAN PERKARA TAHAP II TINDAK PIDANA TERORISME BULAN JANUARI 2022



Pada tanggal 17 Februari 2022 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengamanan Penuntut Umum Terkait Pelimpahan Perkara Tahap II Tindak Pidana Terorisme Bulan Januari 2022 yang dilaksanakan di Hotel Veranda Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT dan dihadiri oleh Alex Adam (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur); Suroyo, S.H., M.Hum. (Kasubdit Perlindungan Aparat Penegak Hukum); Kombes Pol Erwin Kurniawan (Kabag Renops Robinops SOPS Polri); Pak Herry (Kasi Wilayah I Direktorat TPTLN Kejaksaan RI); Agus Julianto Purnomo, S.H. (Jaksa Penuntut Umum); Rifqi Ari Alfa, S.H., M.H. (Jaksa Penuntut Umum); Nuju, S.H. (Kasi Intel Direktorat A); Kompol Albert Arisandi (Kanit Intel Satgaswil DKI); Eki Mufaqih (Penyidik JAD Priyangan Timur).

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi agar proses pelimpahan perkara tahap II

berjalan aman dan lancar, juga memberikan hasil yang optimal. Hal yang dicapai dalam kegiatan ini ialah dapat memberikan pemahaman bahwa jaksa penuntut umum perlu lebih waspada dalam proses penanganan perkara dan mendapat perlindungan pada penanganan perkara tertentu. Juga berkoordinasi dengan POLRI. Dan juga kegiatan ini mengawali pembentukan Tim Pemantauan Kerawanan dan Tim Monitoring Evaluasi yang dikoordinir oleh BNPT dengan bekerja sama dengan Polri.



RAPAT KOORDINASI INTELIJEN ANALISIS POTENSI ANCAMAN PEMALSUAN PASPOR SEBAGAI MODUS KEPULANGAN FTF INDONESIA DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN DETEKSI DINI TINDAK PIDANA TERORISME



Rapat Koordinasi Intelijen Analisis Potensi Ancaman Pemalsuan Paspor sebagai Modus Kepulangan FTF Indonesia Dalam Rangka Antisipasi dan Deteksi Dini Tindak Pidana Terorisme ini dilakukan pada 25 Februari 2022 bertempat di *The Westin Hotel* Jl. HR Rasuna Said, Kav C22A, Setiabudi. Kegiatan rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat BNPT diantaranya Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, BNPT Irjen Ibnu Suhendra, S.IK dan Deputy Bidang Kerja Sama Internasional, BNPT Andhika Chrisnayudanto. Selain itu, BNPT turut mengundang beberapa pakar terkait fokus dalam pembahasan rapat terutama Satgas FTF serta Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri, Direktorat 3.3 Badan Intelijen Negara, Direktorat E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Direktorat Keamanan Negara BIK Polri, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Intelijen, Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, Direktorat



Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kementerian Sosial, serta Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat ini bertujuan untuk membahas dinamika perkembangan terorisme, khususnya pergerakan *Foreign Terrorist Fighter (FTF)*. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dan menjadi sarana saling tukar menukar informasi antar komunitas intelijen pusat, kementerian dan lembaga terkait, sehingga diperoleh informasi yang komprehensif sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan

terorisme khususnya terkait potensi kembalinya *FTF* ke Indonesia dengan menggunakan paspor palsu. Hasil yang dicapai dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Intelijen Analisis Potensi Ancaman Pemalsuan Paspor Sebagai Modus Kepulangan *FTF* Indonesia Dalam Rangka Antisipasi dan Deteksi Dini Tindak Pidana Terorisme ini adalah terwujudnya koordinasi antar penyelenggara dan komunitas intelijen terkait antisipasi potensi pemalsuan dokumen perjalanan *FTF* Indonesia. Melalui rapat ini, diperoleh pula informasi terkini berdasarkan perspektif dari undangan yang hadir, khususnya terkait perkembangan terorisme global dan dalam negeri; perkembangan WNI yang terlibat *FTF* di luar negeri; potensi pemalsuan dokumen perjalanan oleh *FTF*; serta peran komunitas intelijen dan kementerian/lembaga terkait upaya antisipasi dan deteksi dini dalam penanganan pemalsuan dokumen perjalanan oleh *FTF* Indonesia.



RAPAT PENYUSUNAN SILABUS PELATIHAN MITIGASI AKSI TERORISME *INTEGRATIVE*



Rapat Penyusunan Silabus Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme *Integrative* ini dilakukan pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 21 – 22 Februari 2022 bertempat di *Hotel Grand Whiz*, Jakarta. Kegiatan rapat ini dipimpin oleh Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT dan di hadiri oleh sejumlah pejabat BNPT diantaranya Kolonel Mar Wahyu Herawan, M.Sc., Kasubdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi BNPT. turut mengundang beberapa pakar terkait fokus dalam pembahasan rapat yaitu Edi Sucipto, S.Sos dari dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI serta Kopol. Albertus Digwijaya A, S.Si dari Brimob Polri.

Rapat ini bertujuan untuk membahas Silabus yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dalam melatih dan meningkatkan kemampuan, wawasan serta kesiapsiagaan aparatur, Memberikan acuan bagi instruktur/pemateri dalam menyusun materi pelatihan, Memberikan

gambaran mengenai kompetensi dan sasaran pelatihan yang akan dicapai dalam kegiatan pelatihan, Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pelatihan, Dokumentasi tertulis (*written document*) sebagai akuntabilitas suatu program pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah penyesuaian pada Naskah Silabus yaitu penyesuaian pada persyaratan personel pelatihan, Personel pelatihan dari TNI lebih banyak pada bagian pengamanan yang berada pada seksi intel, Personel pelatihan dari Polri melibatkan Pam Obvit dan bagian pelayanan markas. Dan Beberapa penyesuaian pada tabel silabus untuk Materi Pelindungan sarana prasarana dari aksi terorisme, Materi manajemen tanggap darurat mitigasi aksi terorisme serta Materi Mitigasi Ancaman Terorisme yang Menggunakan Unsur KBRN. Dalam rapat ini juga mendapat beberapa saran dan masukan yaitu Pelaksanaan Pembinaan Kemampuan BNPT melaksanakan

kegiatan rapat penyusunan silabus Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme *Integrative* metode *Table Top Exercise* (TTx). Adapun tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah dan menguatkan sinergi antar TNI, Polri dan K/L terkait, membangun *sense security awarness* bagi pengelola objek agar bisa melakukan mitigasi

ancaman terorisme dengan sesuai prosedur, Perlu adanya penyamaan persepsi mengenai tujuan dari pelatihan mitigasi dengan memerhatikan bentuk pelatihan, peran peserta, dan target peserta pelatihan. Hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan mekanisme kegiatan pelatihan mitigasi di lapangan nantinya.



PENGUKURAN INDEKS KESIAPAN APARATUR TAHAP I DI KOTA CILEGON

PENGUKURAN IKAP CILEGON - BANTEN

(Polres Cilegon)

Rapat Penyusunan Silabus Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme *Integrative* ini dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 15 – 17 Februari 2022 bertempat di Polresta Cilegon, Kodim 0623/Cilegon, dan Kantor Sekretariat Daerah Pemkot Cilegon. Kegiatan rapat ini dipimpin oleh Direktur Pembinaan Kemampuan. BNPT turut mengundang beberapa pakar terkait fokus dalam pembahasan rapat yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Binmas, Sat Lantas dari Polres Cilegon, Seksi Intelijen, Seksi Operasi, Seksi Teritorial dari Kodim 0623/Cilegon, Seksi bimbingan Narapidana, Seksi Kegiatan Kerja, Satuan Pengaman Lapas dari Lapas Kelas IIA Cilegon, Serta Sekretariat Daerah Cilegon, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Bidang Pemadam Kebakaran, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kepegawaian Daerah, Bidang Sosial dari Pemkot Cilegon.

Rapat ini bertujuan untuk Sosialisasi tentang penyelenggaraan pengukuran IKAP tahun 2021, Sosialisasi tata cara dan pedoman pengisian angket kuesioner dan pengisian uji *post test*, Penyebaran angket kuesioner dan uji *post test* kepada personil di masing – masing satuan yang berada di wilayah Kota Cilegon, Pengukuran dan pengolahan hasil nilai *survey* tersebut



menjadi hasil nilai kesiapan aparaturnya pemerintah. Hasil dari rapat ini adalah pelaksanaan pengukuran *indeks* ini dilaksanakan terhadap responden sejumlah 110 personel dan telah diperoleh nilai indeks kesiapan sebesar 0,73 yang termasuk kategori siap. Hasil dari wilayah Kota Cilegon menyatakan bahwa terdapat

8 responden yang termasuk kurang siap, 20 responden cukup siap, 32 responden siap, dan 29 responden sangat siap. Dampak langsung ke Masyarakat dari kegiatan ini adalah bahwa aparaturnya pemerintah di Kota Cilegon dikategorikan “Siap” dalam penanggulangan Terorisme.





KEGIATAN KEDEPUTIAN III BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL

KUATKAN PAYUNG HUKUM PENANGGULANGAN TERORISME, BNPT SIAPKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DENGAN KERAJAAN SPANYOL



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., didampingi oleh Deputi bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Ibnu Suhendra, dan Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT, Brigjen Pol. Kris Erlangga, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia, H.E. Mr. Francisco De Asis Aguilera Aranda, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, di kantor BNPT Jakarta. Pertemuan ini membahas upaya penguatan kerjasama yang dapat dilakukan di bawah payung *Memorandum Of Understanding* (MoU) dengan Kerajaan Spanyol terkait Penanggulangan Terorisme.

Sebelumnya, BNPT dan Pusat intelijen

Spanyol telah memiliki MoU mengenai kerja sama dalam Melawan Terorisme dan Kejahatan Terorganisir yang ditandatangani pada 20 Oktober 2015 lalu, dan kini keduanya berencana melanjutkan dan segera menandatangani MoU terbaru. Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sinergitas di dunia Internasional dan menjaga hubungan bilateral dengan Spanyol dalam penanggulangan terorisme. Rencana ini pun disambut baik oleh Kepala BNPT dan berharap akan ada keberlanjutan kerjasama ini. Tujuannya tentu untuk meningkatkan informasi intelijen dan semangat memberantas terorisme antar kedua negara.

BNPT DAN IRAN RAJUT KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI MOU



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menerima audiensi Duta Besar Republik Islam Iran, H.E. Mohammad Khosush Heikal Azad pada 21 Februari 2022 di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Kepala BNPT didampingi oleh Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra dan Direktur Kerja Sama Bilateral, Brigjen Pol. Kris Erlangga.

Kedua belah pihak berdiskusi terkait kondisi serta upaya *preventif* yang dilakukan oleh masing-masing negara dalam rangka pencegahan kejahatan tindak pidana terorisme yang termasuk kejahatan internasional. Kepala BNPT menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi isu *Foreign Terrorist Fighter* (FTF), penyalahgunaan narasi agama dalam aksi terorisme dan radikalisme melalui ruang *digital*.

Fenomena tersebut dapat terjadi di mana saja, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan negara sahabat dalam menghadapinya. Kepala BNPT pun mendorong adanya MoU Indonesia dan Iran dalam menanggulangi terorisme.

Senada dengan Kepala BNPT, Dubes Iran setuju bahwa permasalahan terorisme harus ditangani di *level regional* dan



internasional. Menurutnya, Iran dan Indonesia perlu bertukar informasi mengingat keduanya memiliki pengalaman yang baik dalam menghadapi terorisme.

Indonesia dan Republik Islam Iran memiliki perspektif yang sama dan sepakat untuk bekerja sama, salah satunya terkait

Foreign Terrorist Fighter (FTF). Lebih dari itu, Dubes Iran juga menyambut inisiasi Kepala BNPT mengenai MoU penanggulangan terorisme. Kerja sama ini diharapkan dapat terus berjalan dengan baik guna bersama menciptakan dunia yang damai dan harmoni.



RAPAT PEMBAHASAN KERJA SAMA PELATIHAN TERKAIT ANCAMAN TERORISME KIMIA, BIOLOGI, RADIOLOGI, DAN NUKLIR (KBRN) OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT



PAPARAN PENAWARAN PELATIHAN PENANGGULANGAN TERORISME KBRN (KIMIA, BIOLOGI, RADIOAKTIF DAN NUKLIR)

DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL
DIREKTORAT KERJASAMA BILATERAL

2022

Pada tanggal 3 Februari 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan Rapat Pembahasan Tawaran Kerja Sama Pelatihan KBRN oleh Pemerintah Amerika Serikat yang dilaksanakan secara *virtual* berdasarkan Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang disampaikan kepada Direktorat Amerika I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Pol. Kris Erlangga dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, yakni: Direktorat Amerika I dan Direktorat KIPS Kementerian Luar Negeri; Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT; Densus 88 AT Polri; Ditzi Nubika TNI AD; Brimob Gegana Polri; Puslabfor Polri; Bareskrim Polri; dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Dalam rapat ini, Direktur Kerjasama Bilateral menyampaikan bahwa BNPT

menyambut baik tawaran kerja sama dari Pemerintah Amerika Serikat yang akan diselenggarakan oleh *The U.S. Department of State's Office of WMD Terrorism* (WMDT) bekerja sama dengan konsultan *Merrick & Company*, mengenai pelatihan investigasi penilaian ancaman berbasis perilaku untuk mencegah, mendeteksi, dan mendisrupsi ancaman terorisme kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (KBRN). Hal ini mengingat beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia yang menggunakan unsur KBRN, hampir 90% menggunakan bahan kimia berbahaya seperti *Tri Aceton Triperoxide*. Selebihnya, ada beberapa kasus yang menggunakan bahan radioaktif dan biologi yaitu di Antapani (penyalahgunaan *Thorium*) dan tindakan teror kepada polisi (penyalahgunaan Biji Jarak).

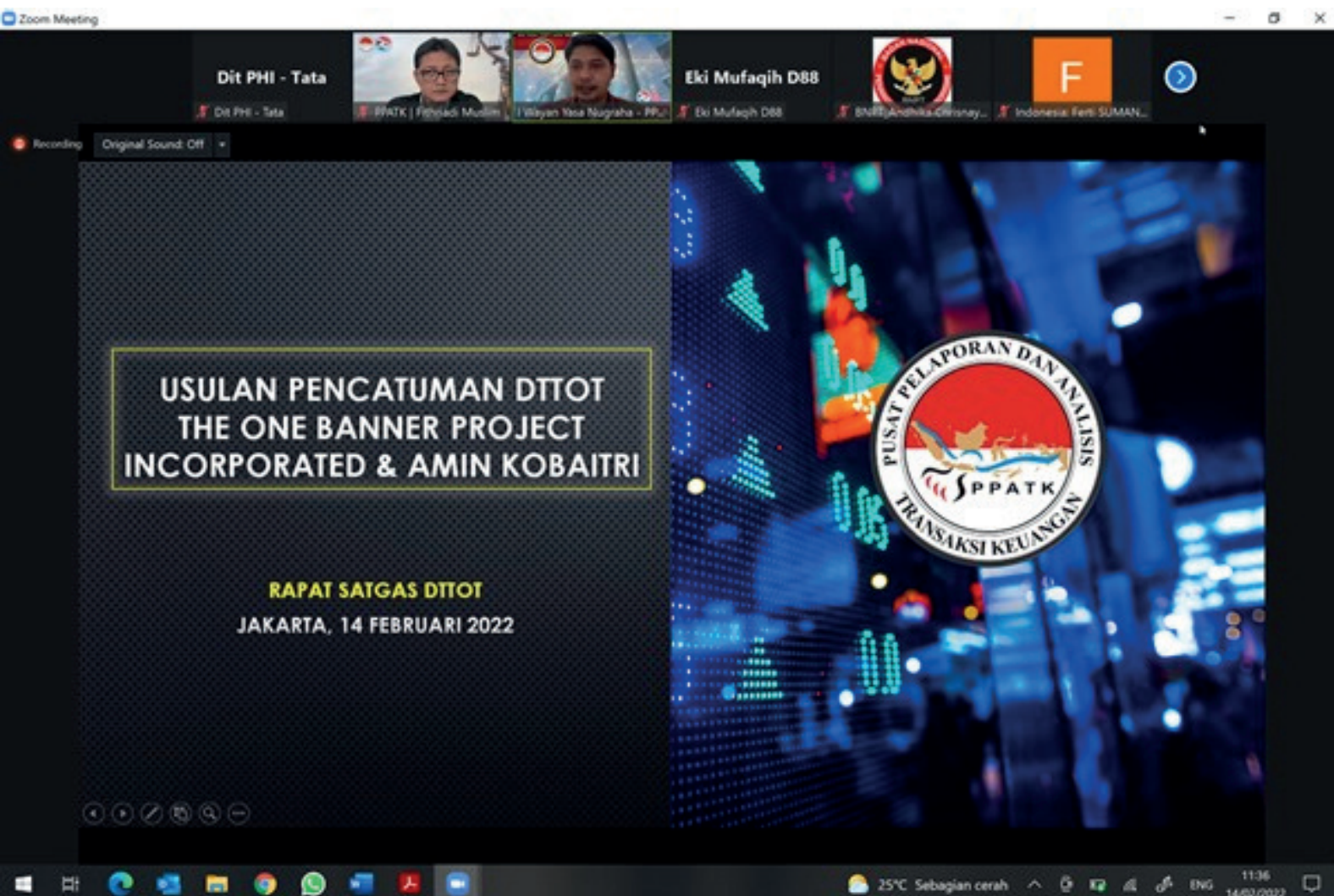
Adapun tawaran pelatihan dengan narasumber yang terdiri dari para ahli dari *Asia Pacific Association of Threat Assessment*

Professionals ini, akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) fase, yakni: fase diskusi *virtual*; fase diskusi *in person* pelatihan regional selama 3 hari; dan fase bimbingan jarak jauh. Selain itu, BNPT selaku *focal point* kerja sama penanggulangan terorisme

Republik Indonesia-Amerika Serikat, akan mengoordinasikan partisipasi perwakilan dari K/L serta mengidentifikasi kebutuhan, *format*, dan kerangka waktu pelatihan untuk mengoptimalkan kemanfaatan bagi Indonesia.



BNPT MENGHADIRI RAPAT SATUAN TUGAS DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT) YANG DILAKSANAKAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diwakili oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andhika Chrisnayudhanto beserta Sub Koordinator Konvensi Internasional, Sub Koordinator Resolusi Internasional, perwakilan dari Direktorat Penegakan Hukum menghadiri Rapat Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dilaksanakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 14 Februari 2022. Rapat yang dilaksanakan secara *virtual* dan dibuka oleh Direktur Hukum PPATK ini terdiri dari 5 (lima) agenda pembahasan.

Agenda pertama dalam rapat ini adalah penyampaian laporan hasil pertemuan PPATK dengan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dan Setum Polri terkait mekanisme pencantuman DTTOT dan pemanfaatan aplikasi DTTOT. Agenda kedua adalah pembahasan tindak lanjut Pemerintah Indonesia atas pencantuman *World Human Care* (WHC) dan *Majelis Mujahidin* Indonesia (MMI) kedalam *national list* Amerika Serikat. Agenda ketiga pada pertemuan ini adalah usulan pencantuman DTTOT kepada salah satu entitas asal Australia yaitu *The One Banner Project Incorporated* (OBP) serta 1 (satu) *individu* yang terkait yaitu Amin Kobaitri. Terkait hal ini, Deputi Bidang Kerjasama Internasional mendukung upaya pencantuman OBP, namun perlu untuk dilakukan upaya *demarche* terlebih dahulu kepada negara terkait perihal entitas

OBP yang memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme di Indonesia.

Agenda keempat yaitu klarifikasi mengenai indikasi pendanaan terorisme terhadap 198 pesantren terafiliasi terorisme. Agenda kelima merupakan pembahasan tindak lanjut Polri khususnya Densus 88 AT atas Rekomendasi Satgas DTTOT mengenai pencantuman 5 *individu* KKB ke dalam DTTOT.

Berdasarkan hasil rapat Satgas DTTOT tersebut, disepakati bahwa dapat dilakukan upaya pencantuman untuk entitas WHC. Anggota Satgas DTTOT akan mengumpulkan informasi lebih lanjut

untuk keperluan pencantuman WHC dalam DTTOT. Setelah itu, akan dilanjutkan penyusunan surat rekomendasi dari PPATK dan BNPT sampai dengan proses penetapan pengadilan oleh PN Jakarta Pusat. Selain itu, seluruh K/L turut mendukung upaya pencantuman 1 (satu) entitas yang berasal dari Australia, yaitu *The One Banner Project* (OBP). *Demarche* akan dilakukan terlebih dahulu ke pihak otoritas Australia sebelum dilaksanakan upaya pencantuman. Setelah itu, informasi lebih lanjut akan disampaikan kepada Satgas DTTOT terkait perkembangannya.



KEGIATAN SESTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

BNPT DAN BRIN TEKEN MOU PROGRAM PENCEGAHAN TERORISME BERBASIS RISET



Menindaklanjuti audiensi yang sebelumnya telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BNPT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman guna mengatur kerja dan meningkatkan koordinasi dalam pencegahan terorisme. Kegiatan dilakukan dengan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan dihadiri oleh Kepala BNPT beserta dengan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan BNPT. Seperti halnya *virus*, bahaya terorisme tidak bisa dianggap remeh. Bila tidak segera ditangani dapat menyerang pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT dalam sambutannya. Kepala BRIN, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc hadir dalam pandangan kerjasama ini. Langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan

perlu komitmen dari berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme intoleran. Untuk itu BNPT juga melakukan pencegahan radikal terorisme intoleran berbasis penelitian dan riset. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini yaitu pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan para pihak penelitian,



pengembangan riset dan inovasi bersama serta pencegahan terkait paham radikalisme intoleran. Selain upaya kolaborasi, *MoU* ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas pencegahan terorisme dan meningkatkan peran aktif *multi pihak* sesuai dengan fungsinya

masing -masing. Tindak lanjut dari acara penandatanganan *MoU* ini adalah pengidentifikasian kesamaan program dan kegiatan sehingga kolaborasi penanggulangan paham radikal terorisme dapat berjalan dengan baik.



GELAR SHARING SESSION, BNPT AJAK MEDIA UNTUK MENYUARAKAN NARASI PERDAMAIAN GUNA MEREDAM NARASI UJARAN KEBENCIAN DAN HOAKS



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan *Sharing Session* bersama media massa mengusung tema “Konsep *Pentahelix* Pencegahan Radikalisme dan Terorisme”. Dalam kegiatan ini narasumber dari BNPT Direktur Deradikalisasi pada Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Prof. Irfan Idris, M.A dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Kombes Pol. Astuti Idris, S.Sos. menjelaskan konsep *pentahelix* pencegahan radikalisme dan terorisme yang menitikberatkan kerjasama dan kolaborasi multipihak melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk media. Media memiliki peran yang besar dalam upaya penanggulangan terorisme melalui narasi

yang mengedukasi, mengkritik dan jauh dari memprovokasi. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT menjelaskan kerjasama dan kolaborasi media sejalan dengan visi dan misi BNPT yang mengacu pada Renstra BNPT 2020-2024. Misi BNPT salah satunya melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya



tindak pidana terorisme. Pencegahan tersebut dapat berhasil dengan adanya bantuan dari media salah satunya dengan kontra propaganda radikalisme terorisme. Selain kontra propaganda, para insan pers diharapkan mampu meredam narasi *hoaks* dan *hate speech* yang dapat menciptakan provokasi dan polarisasi di masyarakat, menyuarakan narasi perdamaian dengan bingkai konsensus kebangsaan serta mengedukasi masyarakat agar tercipta

early warning terhadap radikalisme terorisme.

Dalam kegiatan *sharing session* ini puluhan media baik elektronik, *online* dan cetak tercatat hadir diantaranya Tempo, Detik, Antara, Kompas, Republika dan Tribunnews. Perwakilan media yang hadir tersebut berdialog dengan pejabat perwakilan BNPT dalam rangka memberikan pesan dan saran yang membangun agar BNPT dan media dapat terus bersinergi dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme.







KEGIATAN SINERGISITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

BNPT DAN PEMKOT MADIUN AKAN DIRIKAN WARUNG NKRI UNTUK PENCEGAHAN TERORISME



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali melakukan pendekatan serta kolaborasi dengan multi pihak di provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan upaya kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi di tengah masyarakat. Untuk itu dalam mengawali rangkaian kunjungan kerja Komjen Pol. Boy Rafli Amar silaturahmi dengan FORKOPIMDA kota Madiun di Taman Sumber Wangi. Didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhendra serta jajaran. Kedatangan Kepala BNPT disambut Walikota Madiun Haji Maidi bersama unsur FORKOPIMDA, dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tumbuh

dan menjadi bukti nyata terjaganya kerukunan dan toleransi di Kota Madiun sejak tahun 2015. Komunitas ini beranggotakan masyarakat dari beragam suku, ras, dan agama serta kerap bekerjasama dengan pemerintah dalam menyebar pesan damai.



PERESMIAN RUMAH SUSUN PONDOK PESANTREN ANAK MITRA DERADIKALISASI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN



Melalui tim sinergisitas, BNPT bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Lamongan serta Yayasan Lingkaran Perdamaian di Lamongan. Peresmian Pondok Pesantren tersebut dihadiri oleh Kepala BNPT beserta jajaran perwakilan dari Kementerian PUPR, jajaran Pemerintah Lamongan dan pendiri Yayasan Lingkaran Perdamaian Ali Fauzi. Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT berharap agar Rusun Pondok Pesantren Yayasan Lingkaran Perdamaian dapat jadi sarana dalam mencerdaskan anak bangsa yang beriman, bertaqwa dan berjiwa nasionalisme. Ali Fauzi berkomitmen, rumah susun akan digunakan untuk sarana belajar gratis bagi anak-anak dari eksnapiiter dan masyarakat kurang mampu. Yayasan lingkaran perdamaian merupakan mitra BNPT yang aktif dalam

sejumlah program deradikalisasi. Dukungan BNPT dalam pembangunan rusun ini merupakan bentuk kerjasama multi pihak dalam upaya membendung masuknya paham radikalisme khususnya di Lamongan Jawa Timur. Pembangunan rumah susun ini merupakan bentuk kerjasama antara Tim Sinergisitas BNPT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP). Rusun ini akan digunakan untuk menampung anak-anak mitra deradikalisasi di Pondok Pesantren Lingkaran Perdamaian yang tengah mendalami ajaran agama. Kepala BNPT berharap rusun ini dapat dimanfaatkan dengan baik terutama dalam mendidik anak bangsa yang beriman, bertaqwa, dan nasionalis.

GELAR RAPAT FINALISASI RENCANA AKSI KEGIATAN SINERGISITAS ANTAR K/L TAHUN 2022, BNPT HARAP KOLABORASI PENANGGULANGAN TERORISME TIM SINERGISITAS SEMAKIN MENINGKAT



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan Rapat Finalisasi Rencana Aksi Kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga Tahun 2022. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Bangbang Surono, Ak., M.M., yang membuka kegiatan ini mengatakan rencana aksi kegiatan sinergisitas merupakan wujud dari rasa kebersamaan dan persaudaraan seluruh Kementerian/Lembaga yang tergabung ke dalam Tim Sinergisitas dalam upaya bersama penanggulangan terorisme. Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat Bangbang Surono Ak., M.M., menambahkan Tim Sinergisitas di tahun sebelumnya telah berpartisipasi dalam memberikan layanan dasar seperti

pembuatan sumur air, perbaikan jalan, renovasi rumah dan elektrifikasi kepada Kelompok Sasaran. Tim Sinergisitas telah memberikan dukungan kesejahteraan seperti pelatihan wirausaha dan pemberian modal. Selain layanan dasar dan kesejahteraan, wawasan kebangsaan dan moderasi agama juga penting diberikan kepada kelompok sasaran. Dalam pembukaan rapat ini, Kepala Biro Perencanaan,



Hukum, dan Hubungan Masyarakat Bangbang Surono, Ak., M.M., berharap di tahun 2022 Tim Sinergisitas akan semakin kuat dan memiliki dampak yang luas dalam upaya bersama penanggulangan terorisme. Penyusunan rencana aksi telah memberikan manfaat dan sangat membantu upaya penanggulangan terorisme. Di tahun 2022 Tim Sinergisitas Penanggulangan Terorisme BNPT akan melakukan program Sinergisitas Reguler, Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan Wadah Akur Rukun Usaha

Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI).

Rapat ini dihadiri langsung oleh sejumlah perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemendagri, Kominfo, Kementan, Kemenkumham, BAIS TNI, BIN, PPATK, Kejaksaan, Kemenko Marves, Kementerian Parekraf, ESDM, LHK, Kelautan dan Perikanan. Sejumlah perwakilan juga mengikuti secara zoom atau daring diantaranya Kementerian Perhubungan, PUPR, Investasi, Kementerian Pan RB dan POLRI.



PAHAMI POTENSI DAN PELUANG USAHA WILAYAH DEMI KESEJAHTERAAN MITRA DERAD, KEPALA BNPT HADIRI RAPAT SINERGISITAS KTN (KAWASAN TERPADU NUSANTARA)



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., memantau persiapan Pembentukan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) melalui Rapat Sinergisitas KTN. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menghimbau agar masing-masing Kasubsatgas wilayah memahami betul potensi dan peluang usaha di setiap wilayah. Sementara itu Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP, menyarankan agar *timeline* kegiatan sinergisitas yang sudah dibuat segera ditindaklanjuti. Rencana tahapan kerja kegiatan KTN (Kawasan Terpadu Nusantara) tahun 2022 diawali dengan penetapan lokasi, pembentukan koperasi dan penyusunan dokumen kerja. Dalam rapat ini setiap Kasubsatgas 5 provinsi

memaparkan perkembangan, potensi wilayah serta kendala yang dihadapi. Kasubsatgas Jawa Timur memaparkan salah satu wilayah KTN yang berlokasi di Turen, Kabupaten Malang rencananya akan dikembangkan menjadi lahan penanaman jagung.

Kasubsatgas Jawa Tengah juga memaparkan komoditi unggulan di Kawasan Bansari, Jawa Tengah serta koperasi Rejo Mulyo yang sudah terbentuk. Sebagai informasi, saat ini terdapat 6 koperasi di 5 provinsi KTN yang sudah berdiri dan akan di daftarkan. Selain itu, di setiap Kawasan akan dibangun Warung NKRI. Dibutuhkan percepatan kerjasama dengan Mitra, pendamping di lapangan, serta koordinasi yang baik untuk percepatan pembangunan KTN (Kawasan Terpadu Nusantara).



PERKEMBANGAN SINERGISITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

BNPT TETAPKAN LIMA LOKUS DAERAH SEBAGAI KAWASAN PRIORITAS KTN 2022

Provinsi	Lokasi			Luas (Ha)	Kepemilikan Lahan	Kelembagaan	Potensi Lahan / Rencana Pengembangan
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Jawa Barat	Kab. Garut	Kadunggora	Harumansari	85	Perhutani	LMDH Buana Mukti	Pertanian, Peternakan dan Wisata Komoditi : Tanaman Kayu, Rempah seperti Kapulaga, Jagung dan Kacang Tanah.
2. Jawa Tengah	Kab. Temanggung	Bansari	Bansari	150	Perhutani	Koperasi Kopi Rejo Mulyo	Perkebunan Kopi, Peternakan dan Wisata
3. Jawa Timur	Kab. Malang	Turen	Turen	15	Pemkab Malang	Koperasi Artha Harmoni Bangsa	Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
4. NTB	Kab. Sumbawa	Moyo Hulu	Pemek	466	Perhutani	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pertanian, Peternakan, Penelitian dan Wisata
5. Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Bungku Barat	Marga Mulya	300	Pemkab Morowali	Kelompok Tani	Perkebunan dan Peternakan

Pada Kamis, 24 Februari 2022 Tim Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) bersama dengan Tim Sinergisitas serta jajaran Koordinasi Data dan Pelaporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang bertempat di Gedung Baladina BNPT Sentol.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. dihadiri oleh seluruh Satuan Tugas (Satgas) dan Sub Satuan Tugas Wilayah (Sub Satgas Wil), Tim Ahli khusus KTN serta tim intern sinergisitas maupun tim KTN.

Dalam rapat ini forum menetapkan 5 (lima) lokus kawasan prioritas untuk giat KTN sepanjang tahun 2022. Lima lokus kawas tersebut terbar di 5 (lima) Provinsi se Indonesia. Untuk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut dipilih sebagai daerah prioritas dengan spesifikasi lokus yang berada di Desa/Kelurahan Harumansari, Kecamatan Kedunggora dengan luas lahan 85 Ha.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagai daerah prioritas dengan spesifikasi lokus yang berada di Desa/Kelurahan Bansari, Kecamatan Bansari dengan luas lahan 150 Ha dari Perhutani. Sementara di Untuk

Provinsi Jawa Timur, ditetapkan Kabupaten Malang yang terletak di Desa/Kelurahan Turen, Kecamatan Turen dengan luas lahan 15 Ha.

Selain itu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa dipilih sebagai daerah prioritas dengan spesifikasi lokus yang berada di Desa/Kelurahan Pernek, Kecamatan Moyo Hulu dengan luas lahan 466 Ha. Dan Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dipilihlah Kabupaten Morowali dengan lokus yang berada di Desa/Kelurahan Manga Mulya, Kecamatan Bangku Barat dengan luas lahan 300 Ha.

Selain menetapkan lima kawasan prioritas KTN, Kepala BNPT juga mengimbau agar Satgas dan Subsatgaswil serta tim ahli KTN dengan semaksimal mungkin menyiapkan segala bentuk persiapan demi sukses giat KTN di tahun ini. Karenanya, hal penting yang perlu disiapkan setelah lahan tersedia, tutur kepala BNPT adalah memastikan setiap daerah yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas KTN untuk segera mengurus dan melengkapi Koperasi masing-masing serta berkordinasi dengan pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah lokan dan nasional, dengan KL, dengan dinas daerah maupun dengan *Corporate social responsibility* (CSR) yang siap bekerjasama.

KONDISI KOPERASI DI 5 (LIMA) KAWASAN PRIORITAS KTN 2022

JAWA
BARAT

KOPERASI HARMONI HARUMAN GARUT, KAB. GARUT

JAWA
TENGAHKOPERASI CAHAYA MATA KEARIFAN, KAB. BATANG
KOPERASI KOPI REJO MULYO, KAB. TEMANGGUNGJAWA
TIMUR

KOPERASI ARTHA HARMONI BANGSA, KAB. MALANG

NUSA
TENGGARA
BARATKOPERASI SATRIA MBOJO HARMONI, KOTA BIMA
KOPERASI MITRA HARMONI ABADI, KAB. SUMBAWASULAWESI
TENGAH

KOPERASI BRAHMAN JAYA MOROWALI, KAB. MOROWALI

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang bertempat di Gedung Baladika BNPT Sentol, Kamis, 24 Februari 2022 seluruh Sub Satuan Tugas Wilayah (Sub Satgas Wil) paparkan kesiapan dan progres koperasi sebagai penunjang utama terlaksananya Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Hal ini menindak lanjuti dari himbauan Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. yang meminta Sub Satgaswil dengan Tim KTN untuk menyiapkan koperasi di masing-masing lokus KTN.

Berdasarkan paparan Sub Satgaswil dari masing-masing provinsi sejauh ini beberapa kawasan prioritas KTN telah membentuk Koperasi. Namun ada sebagian dari mereka yang belum mendapatkan legalitas dari pemerintah terkait.

Adapun koperasi yang sudah didaftarkan dan memiliki akte resmi adalah: pertama, koperasi Harmoni Haruman Garut untuk KTN Kabupaten Garut, Jawa Barat, kedua dan ketiga, Koperasi Cahaya Mata Kearifan bertempat di Kabupaten Batang dan Koperasi Kopi Rejo Mulyo yang terletak di Kabupaten Temanggung untuk KTN Jawa Tengah, dan keempat, Koperasi Artha Harmoni Bangsa untuk KTN di Kabupaten Malang.

Sementara Koperasi Satria Mbojo Harmoni, Kota Bima dan Koperasi Mitra Harmoni Abadi, Kab. Sumbawa untuk KTN di Provinsi NTB serta Koperasi Brahman Jaya Morowali, Kab. Morowali untuk KTN di Provinsi Sulawesi Tengah belum terdaftar secara resmi.

TIM KTN KAWAL SELURUH PERSIAPAN SOFT LAUNCHING KTN TUREN, MALANG

Demi suksesi *soft launching* Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang akan dimulai dari KTN Turen, Malang, seluruh Tim KTN kawal berbagai bentuk persiapannya. Sejak awal Februari, Tim KTN telah menyusun draft proposal KTN, Turen yang difinalisasi pada 9 Februari 2022.

Pada 22 Februari 2022 Tim KTN selenggarakan rapat bersama dengan *Corporate social responsibility* (CSR) PT. Smelting terkait dengan rencana kerjasama inseminasi buatan, kawin silang antara Sapi Bali dan Banteng Jawa. Rapat ini diselenggarakan di Kwarnas Indonesia serta melalui saluran *online Zoom meeting*. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapak Sub Satuan Tugas Wilayah (Sub Satgas Wil) Jawa Timur Kolonel Sus Solihuddin Nasution.

Dalam diskusi rapat yang berjalan selama 1 (satu) jam lebih, PT Smelting menyatakan belum siap untuk mengimplementasikan rencana inseminasinya di saat *soft launching* KTN Malang disebabkan belum menemukan bibit sapi unggul serta belum memadainya fasilitas kandang sapi seperti yang diinginkannya.

Pimpinan rapat Solihuddin Nasution memutuskan bahwa kerjasama akan tetap dilanjutkan di hari-hari berikutnya sejalan dengan perkembangan KTN serta kesiapan PT. Smelting. Pihaknya meminta setidaknya pada saat *soft launching* PT. Smelting menyiapkan *draft Memorandum of*

Understanding (MoU) yang akan ditandatangani bersama antara pihak *Corporate social responsibility* (CSR) dan pihak BNPT.

Selain itu, pihaknya bersama dengan Ibu Inggit Kentjonowaty akan mengajukan proposal program peternakan kepada dinas kementerian pertanian dan peternakan Malang, yang jika memungkinkan akan bekerjasama peternakan di KTN Turen, Malang.

Sementara itu, *team leader* Sinergisitas Bapak AM. Jufri meminta PT. Smelting untuk menyiapkan paparan rencana kerjasama dalam bentuk *video* yang bisa ditayangkan pada saat *soft launching* nanti. Hal ini mendapat respon positif dari perusahaan untuk terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan timnya, Taman Mini Indonesia.

Selain itu, pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KTN yang diselenggarakan di gedung Baladika BNPT, Sentul pada Kamis, 24 Februari 2022 Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. meminta Tim KTN untuk menyiapkan Pos Koordinasi (Posko) serta plang KTN Malang.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Perencanaan (Karoren) Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Bangbang Surono, Ak., M.M. bahwa Tim KTN harus menyiapkan seluruh bentuk persiapan *soft launching* KTN Turen, Malang. Pihaknya juga menegaskan agar seluruh bentuk dokumentasi koperasi disiapkan secara matang.

REVISI DASAR HUKUM



Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Kepmenko Polhukam Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga pada 18 Februari 2022.

Kegiatan dilaksanakan di *Hotel A-One* yang dipimpin oleh Bapak Chairil Anwar (Koordinator Data dan Pelaporan serta dihadiri oleh Bapak Dado. A. Ekroni (Koordinator Materi Hukum Publik Kemenko Polhukam) dan Ibu Ria Arsanti (Kemenko

Polhukam) serta staf Bagian Data dan Pelaporan/Tenaga Pendukung Sinergisitas dan stag Bagian Hukum dan Humas BNPT.

Hasil kegiatan menyepakati Draft Revisi Kepmenko Polhukam yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian /Lembaga Tahun 2022-2023. *Draft* akan disampaikan kepada Asisten Deputi terkait di Kemenko Polhukam.



FINALISASI RENCANA AKSI



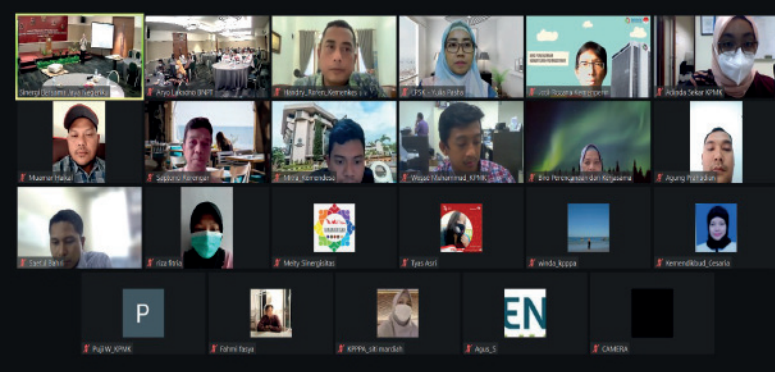
Telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Tahun 2022 pada 22-23 Februari di Hotel Horison Rasuna Jakarta.

Kegiatan mengundang 46 Kementerian/Lembaga. Pada hari pertama melibatkan Kementerian/Lembaga bidang Politik, hukum, dan keamanan dan bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada hari kedua melibatkan Kementerian/Lembaga bidang Perekonomian dan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Hasil kegiatan yaitu telah dikonfirmasi rencana aksi:

1. Bidang Polhukam sebanyak 199 rencana aksi;
2. Bidang PMK sebanyak 90 rencana aksi;
3. Bidang Perekonomian sebanyak 178 rencana aksi;
4. Bidang Kemaritiman dan Investasi sebanyak 21 rencana aksi.

Total rencana aksi per 23 Februari yaitu 488 rencana aksi.





TINDAK LANJUT RAN PE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

MAKSIMALKAN IMPLEMENTASI PROGRAM RAN PE, BNPT GELAR RAPAT TIM INTERNAL PERDANA DI 2022

Dalam rangka memaksimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, tim internal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar rapat perdana di tahun 2022 pada 11 Februari 2022 di Kantor BNPT, Jakarta Pusat. Rapat yang dilaksanakan secara luring dan daring ini dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Dedi Sambowo, S.IP.

Dalam rapat, tim kelompok Pilar I, II, dan III lakukan identifikasi aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 serta optimalkan aksi yang telah disusun pada tahun 2021 sebelum dimatangkan kembali pada Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pertama yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Selain itu, rapat tim internal pertama kali ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing personil yang tergabung dalam RAN PE agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Sebagai koordinator pelaksana, tim internal RAN PE diharapkan dapat mendorong 48 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk secara aktif menjalankan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024.

Sepanjang tahun 2021, BNPT telah membangun mekanisme peraturan RAN PE, diantaranya membentuk sekretariat bersama (Sekber) sebagai unit pelaksana RAN PE dan kelompok kerja (Pokja) serta merancang tata cara koordinasi, monitoring dan evaluasi kerja pelaporan RAN PE.

www.bnpt.go.id